



**BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 2 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PULANG PISAU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 Nomor 17).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pulang Pisau.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.



5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
10. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi, Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDES adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDES adalah penjabaran dari RPJMDES untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Pulang Pisau yang diberikan kepada semua desa se-Kabupaten Pulang Pisau yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.



15. SILTAP merupakan Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa yang dihitung dan dibayarkan tiap bulan berdasarkan kinerja.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
19. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
20. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
23. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
24. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.



25. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
26. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat POKJA merupakan kumpulan orang yang merupakan satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tugas atau kegiatan dalam mencapai tujuan Bersama.

## **BAB II**

### **PENETAPAN ADD**

#### Pasal 2

- (1) ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2019 terdiri dari:
  - a. Anggaran Belanja Bidang Kegiatan untuk mendanai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak; dan
  - b. SILTAP Aparatur Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW.
- (2) Jumlah ADD Kabupaten Pulang Pisau tahun anggaran 2019 ditetapkan sebesar **Rp. 55.000.000.000,-** (lima puluh lima miliar rupiah) yang dibagikan kepada 95 (sembilan puluh lima) Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

- (1) ADD merupakan bagian dari pendapatan desa dan dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 4

- (1) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi dasar secara merata senilai 90% (lima puluh perseratus) dari total pagu anggaran dibagi kepada 95 desa;
  - b. Alokasi formula senilai 10% (sepuluh perseratus) dari total pagu anggaran yang dihitung dengan memperhatikan Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah, dan Indeks Kesulitan Geografis Desa di Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Penghitungan Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini, dialokasikan berdasarkan jumlah Perangkat Desa, Anggota BPD dan RT/RW.

#### Pasal 5

Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{ADD Kab} = \text{AF desa} + \text{AD Kab}$$

$$\text{AF desa} = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)]$$

Keterangan:

AF desa = Alokasi Formula Setiap Desa.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten Pulang Pisau.

ADD Kab = Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulang Pisau

AD Kab = Besaran Alokasi Dasar untuk setiap Desa.



#### Pasal 6

SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b), dihitung dan dibayarkan setiap bulan dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. SILTAP Kepala Desa sebesar Rp. 3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
- b. SILTAP Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.
- c. SILTAP Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Kepala Seksi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan.
- d. Insentif Ketua RW dan RT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- e. Tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan.
- f. Tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.
- g. Tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan.
- h. Tunjangan Anggota BPD sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan.

### **BAB III**

### **PAJAK ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengeluaran Kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **BAB IV PENGUNAAN ADD**

### **Pasal 8**

Prinsip penggunaan dan pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah dan terkendali.

### **Pasal 9**

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a digunakan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

### **Pasal 10**

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa diprioritas untuk membiayai Operasional dan Honorarium, sebagai berikut :

- a. Operasional Pemerintahan Desa dengan kegiatan antara lain :
  1. Honorarium PKPKD
  2. Honorarium PPHP;
  3. Honorarium PPKD;
  4. Honorarium Staf Perangkat Desa;
  5. Alat Tulis Kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makan dan minum rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa, pemeliharaan kendaraan dinas, pakaian dinas dan atribut, perjalanan dinas; dan/atau
  6. Jaminan Kesehatan Bagi Aparatur Desa.
- b. Maksimal 10% (sepuluh persen) dari ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diperuntukkan untuk Operasional BPD;



- c. Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional RW/RT sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- d. Maksimal 3% (tiga persen) dari ADD sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipergunakan untuk menunjang kegiatan penyusunan profil desa, antara lain untuk :
  - 1. Biaya internet dan/atau pulsa untuk internet;
  - 2. Honorarium POKJA;
  - 3. Belanja alat tulis kantor, belanja cetak dan penggandaan; dan/atau
  - 4. Bantuan transportasi bagi POKJA profil desa/kelurahan.

#### Pasal 11

- (1) Honorarium PKPKD, PPKD dan PPHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, nilai atau besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Honorarium Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a angka 4 yaitu terdiri dari Pengelola administrasi desa/BPD, operator komputer, jaga malam dan petugas kebersihan kantor desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan nilai maksimal sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan.

#### Pasal 12

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c untuk Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diprioritas untuk membiayai hal-hal sebagai berikut:

- a. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- b. Kebudayaan dan kegamaan;
- c. Kepemudaan dan Olahraga; dan
- d. Kelembagaan masyarakat.



### Pasal 13

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d untuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa diprioritas untuk membiayai Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

### Pasal 14

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e untuk Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Pelaksanaan penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Penganggaran untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan menggunakan jenis belanja tidak terduga.

### Pasal 15

Penggunaan ADD tidak diperkenankan untuk ganti rugi tanah (lahan), bangunan-bangunan yang tidak memiliki manfaat sosial ekonomi (seperti tugu batas desa, gapura, taman dan sejenisnya) dan pembangunan tempat ibadah baru. Khusus untuk tempat ibadah apabila sifatnya rehabilitasi atau pemeliharaan diperkenankan menggunakan ADD dengan memperhatikan keanekaragaman pemeluk Agama yang ada di desa.

## **BAB V PENYALURAN ADD**

### Pasal 16

- (1) Penyaluran ADD kepada desa dilakukan secara bertahap melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- (3) Penyaluran ADD secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. tahap I paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling lambat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);



- c. tahap III paling lambat bulan September sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- d. tahap IV paling lambat bulan November sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan jumlah anggaran dalam tiap tahap sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (3), dapat dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen :
  - a. Surat permohonan penyaluran ADD tahun anggaran 2019;
  - b. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan ADD tahap sebelumnya;
  - c. Laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya;
  - d. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Tahun Anggaran 2019 dengan format Aplikasi SISKEUDES;
  - e. Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
  - f. Dokumen permohonan penyaluran ADD tersebut dilengkapi dengan surat Rekomendasi dari Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau;
  - g. Dokumen Permohonan, Laporan Realisasi, Laporan Pendahuluan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab dibuat sesuai dengan bentuk format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VI**  
**PENGELOLAAN ADD**

Pasal 18

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa.



- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari tindakan dan/atau kinerja Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai pengertian bahwa pengelolaan keuangan Desa, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban wajib melibatkan para pemangku kepentingan di Desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.
- (5) Tertib dan disiplin anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara tepat waktu dan tepat guna dengan didukung bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
- (2) Pengelolaan keuangan desa meliputi :
  - a. Perencanaan;
  - b. Pelaksanaan;
  - c. Penatausahaan;
  - d. Pelaporan; dan
  - e. Pertanggungjawaban.
- (3) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PPKD.



## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal 20

Pembinaan terhadap penggunaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Camat se-Kabupaten Pulang Pisau

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan oleh Instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, dengan tugas meliputi :
  - a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
  - b. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
  - c. Melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - d. Membantu Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan untuk memberikan Pelatihan dan Orientasi Kepada Pemerintah Desa dan Pelaksana Kegiatan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset desa;
  - e. Melakukan Fasilitasi dalam pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya menyangkut penggunaan ADD serta mengkoordinasikan pada institusi terkait;
  - f. Melakukan kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan; dan
  - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Pembinaan oleh Camat Sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dilakukan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan tugas meliputi :
  - a. Melaksanakan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
  - b. Membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam wilayah kecamatan;

- c. Mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek secara silang dengan APBDesa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
- d. Membantu Pelaksanaan Kegiatan dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD beserta kelengkapannya;
- e. Memfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ADD;
- f. Melakukan pemeriksaan pengecekan (Verifikasi) dan pemantauan serta pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai dengan ADD;
- g. Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan APBDesa untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- h. Memfasilitasi upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan ADD; dan
- i. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ADD.

#### Pasal 22

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dibebankan pada APBD Kabupaten Pulang Pisau.

#### Pasal 23

Pengawasan atas pelaksanaan ADD dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 24

Dalam hal terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan ADD berdasarkan hasil audit aparat pengawas fungsional atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal : 04 Pebruari 2019

**BUPATI PULANG PISAU,**

ttd

**EDY PRATOWO**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 08 Pebruari 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

**SARIPUDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2019 NOMOR 02

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN PULANG PISAU,**

  
**SUPRIYADI**



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019.

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	=(6)+(9)+(12)+	(17)	(18)= (3) + (17)	(19)
1	DANDANG	171,102,316	1544	0.0131	0.33%	347	0.0274	0.96%	150.61	0.0174	0.17%	48.25	0.0121	0.36%	1.82%	32,899,077	204,001,393	204,001,000
2	TALIO	171,102,316	242	0.0020	0.05%	65	0.0051	0.18%	273.83	0.0317	0.32%	68.36	0.0171	0.51%	1.06%	19,168,998	190,271,314	190,271,000
3	PANGKOH HILIR	171,102,316	738	0.0063	0.16%	41	0.0032	0.11%	121.70	0.0141	0.14%	33.97	0.0085	0.26%	0.67%	12,021,010	183,123,326	183,123,000
4	PANGKOH HULU	171,102,316	1046	0.0089	0.22%	84	0.0066	0.23%	26.53	0.0031	0.03%	37.79	0.0095	0.28%	0.77%	13,874,306	184,976,621	184,977,000
5	KANTAN MUARA	171,102,316	1805	0.0153	0.38%	163	0.0129	0.45%	16.26	0.0019	0.02%	34.28	0.0086	0.26%	1.11%	20,022,241	191,124,556	191,125,000
6	TALIO MUARA	171,102,316	2430	0.0206	0.51%	164	0.0129	0.45%	23.28	0.0027	0.03%	39.10	0.0098	0.29%	1.29%	23,264,197	194,366,513	194,367,000
7	TALIO HULU	171,102,316	2123	0.0180	0.45%	91	0.0072	0.25%	54.77	0.0063	0.06%	38.29	0.0096	0.29%	1.05%	18,998,897	190,101,213	190,101,000
8	PANGKOH SARI	171,102,316	1179	0.0100	0.25%	91	0.0072	0.25%	14.79	0.0017	0.02%	40.06	0.0100	0.30%	0.82%	14,794,203	185,896,519	185,897,000
9	SANGGANG	171,102,316	865	0.0073	0.18%	97	0.0076	0.27%	20.33	0.0024	0.02%	48.10	0.0121	0.36%	0.84%	15,101,050	186,203,366	186,203,000
10	PANTIK	171,102,316	535	0.0045	0.11%	77	0.0061	0.21%	30.81	0.0036	0.04%	42.28	0.0106	0.32%	0.68%	12,270,682	183,372,997	183,373,000
11	BELANTI SIAM	171,102,316	2513	0.0213	0.53%	95	0.0075	0.26%	37.24	0.0043	0.04%	34.98	0.0088	0.26%	1.10%	19,873,793	190,976,109	190,976,000
12	GADABUNG	171,102,316	1552	0.0131	0.33%	74	0.0058	0.20%	27.55	0.0032	0.03%	44.47	0.0111	0.33%	0.90%	16,239,767	187,342,082	187,342,000
13	MULYASARI	171,102,316	1377	0.0117	0.29%	139	0.0110	0.38%	140.68	0.0163	0.16%	39.11	0.0098	0.29%	1.13%	20,444,391	191,546,707	191,547,000
14	KANTAN DALAM	171,102,316	1671	0.0142	0.35%	185	0.0146	0.51%	16.43	0.0019	0.02%	43.50	0.0109	0.33%	1.21%	21,863,234	192,965,549	192,966,000
15	KANTAN ATAS	171,102,316	1045	0.0089	0.22%	110	0.0087	0.30%	111.24	0.0129	0.13%	37.70	0.0095	0.28%	0.94%	16,922,836	188,025,151	188,025,000
16	KARYA BERSAMA	171,102,316	929	0.0079	0.20%	196	0.0155	0.54%	42.79	0.0049	0.05%	48.02	0.0120	0.36%	1.15%	20,737,181	191,839,497	191,839,000
17	CEMANTAN	171,102,316	1016	0.0086	0.22%	182	0.0143	0.50%	602.42	0.0697	0.70%	71.39	0.0179	0.54%	1.95%	35,233,930	206,336,245	206,336,000
18	PAPUYU II SEI. BARUNAI	171,102,316	876	0.0074	0.19%	96	0.0076	0.26%	63.32	0.0073	0.07%	42.82	0.0107	0.32%	0.85%	15,274,023	186,376,338	186,376,000
19	KIAPAK	171,102,316	739	0.0063	0.16%	105	0.0083	0.29%	143.76	0.0166	0.17%	51.44	0.0129	0.39%	1.00%	18,049,610	189,151,926	189,152,000
20	PAPUYU I SEI. PASANAN	171,102,316	1963	0.0166	0.42%	792	0.0624	2.19%	98.19	0.0114	0.11%	49.45	0.0124	0.37%	3.09%	55,748,658	226,850,973	226,850,000
21	SEI. RUNGUN	171,102,316	1464	0.0124	0.31%	100	0.0079	0.28%	46.21	0.0053	0.05%	46.71	0.0117	0.35%	0.99%	17,893,081	188,995,396	188,995,000
22	BAHAUR HILIR	171,102,316	2243	0.0190	0.47%	75	0.0059	0.21%	99.19	0.0115	0.11%	54.94	0.0138	0.41%	1.21%	21,850,373	192,952,689	192,953,000
23	BAHAUR TENGAH	171,102,316	2878	0.0244	0.61%	473	0.0373	1.31%	304.63	0.0352	0.35%	34.05	0.0085	0.26%	2.52%	45,568,358	216,670,674	216,671,000
24	BAHAUR HULU	171,102,316	1572	0.0133	0.33%	192	0.0151	0.53%	111.47	0.0129	0.13%	52.92	0.0133	0.40%	1.39%	25,097,155	196,199,471	196,199,000
25	PAPUYU III SEI. PUDAK	171,102,316	2423	0.0205	0.51%	451	0.0356	1.24%	124.76	0.0144	0.14%	47.71	0.0120	0.36%	2.26%	40,830,713	211,933,029	211,933,000
26	TANJUNG PERAWAN	171,102,316	1511	0.0128	0.32%	66	0.0052	0.18%	3.88	0.0004	0.00%	42.24	0.0106	0.32%	0.82%	14,886,145	185,988,461	185,988,000



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG							
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	=(6)+(9)+(12)+	(17)	(18)= (3) + (17)	(19)	
27	BAHAUR HULU PERMAI	171,102,316	1798	0.0152	0.38%	496	0.0391	1.37%	62.94	0.0073	0.07%	35.58	0.0089	0.27%	2.09%	37,744,678	208,846,994	208,847,000	
28	BAHAUR BATU RAYA	171,102,316	634	0.0054	0.13%	166	0.0131	0.46%	27.54	0.0032	0.03%	62.43	0.0157	0.47%	1.09%	19,753,626	190,855,942	190,856,000	
29	TANJUNG SANGALANG	171,102,316	337	0.0029	0.07%	37	0.0029	0.10%	39.41	0.0046	0.05%	34.84	0.0087	0.26%	0.48%	8,687,748	179,790,064	179,790,000	
30	PENDA BARANIA	171,102,316	151	0.0013	0.03%	30	0.0024	0.08%	126.82	0.0147	0.15%	61.03	0.0153	0.46%	0.72%	13,011,234	184,113,550	184,114,000	
31	BUKIT RAWI	171,102,316	1020	0.0086	0.22%	9	0.0007	0.02%	23.10	0.0027	0.03%	25.00	0.0063	0.19%	0.46%	8,227,645	179,329,961	179,330,000	
32	TUWUNG	171,102,316	635	0.0054	0.13%	8	0.0006	0.02%	19.68	0.0023	0.02%	39.04	0.0098	0.29%	0.47%	8,541,453	179,643,769	179,644,000	
33	SIGI	171,102,316	628	0.0053	0.13%	18	0.0014	0.05%	114.36	0.0132	0.13%	44.22	0.0111	0.33%	0.65%	11,692,943	182,795,259	182,795,000	
34	PETUK LITI	171,102,316	566	0.0048	0.12%	39	0.0031	0.11%	74.21	0.0086	0.09%	42.15	0.0106	0.32%	0.63%	11,383,776	182,486,092	182,486,000	
35	BUKIT LITI	171,102,316	921	0.0078	0.20%	73	0.0058	0.20%	59.63	0.0069	0.07%	46.05	0.0115	0.35%	0.81%	14,661,502	185,763,818	185,764,000	
36	BAHU PALAWA	171,102,316	481	0.0041	0.10%	18	0.0014	0.05%	68.85	0.0080	0.08%	27.54	0.0069	0.21%	0.44%	7,914,897	179,017,213	179,017,000	
37	PAMARUNAN	171,102,316	577	0.0049	0.12%	45	0.0035	0.12%	63.29	0.0073	0.07%	45.03	0.0113	0.34%	0.66%	11,888,338	182,990,654	182,991,000	
38	BALUKON	171,102,316	358	0.0030	0.08%	64	0.0050	0.18%	64.49	0.0075	0.07%	51.12	0.0128	0.38%	0.71%	12,849,909	183,952,225	183,952,000	
39	BUKIT BAMBA	171,102,316	371	0.0031	0.08%	13	0.0010	0.04%	100.92	0.0117	0.12%	32.90	0.0082	0.25%	0.48%	8,643,663	179,745,979	179,746,000	
40	TAHAWA	171,102,316	810	0.0069	0.17%	132	0.0104	0.36%	115.03	0.0133	0.13%	29.81	0.0075	0.22%	0.89%	16,128,423	187,230,739	187,231,000	
41	PARAHANGAN	171,102,316	884	0.0075	0.19%	134	0.0106	0.37%	87.49	0.0101	0.10%	51.53	0.0129	0.39%	1.05%	18,886,161	189,988,476	189,988,000	
42	BERENG RAMBANG	171,102,316	592	0.0050	0.13%	58	0.0046	0.16%	96.28	0.0111	0.11%	33.25	0.0083	0.25%	0.65%	11,681,978	182,784,294	182,784,000	
43	MANEN PADURAN	171,102,316	351	0.0030	0.07%	16	0.0013	0.04%	85.64	0.0099	0.10%	45.81	0.0115	0.34%	0.56%	10,150,392	181,252,708	181,253,000	
44	MANEN KALEKA	171,102,316	419	0.0035	0.09%	23	0.0018	0.06%	11.98	0.0014	0.01%	48.68	0.0122	0.37%	0.53%	9,611,258	180,713,574	180,714,000	
45	LAWANG URU	171,102,316	902	0.0076	0.19%	26	0.0020	0.07%	83.19	0.0096	0.10%	37.66	0.0094	0.28%	0.64%	11,597,824	182,700,140	182,700,000	
46	HURUNG	171,102,316	383	0.0032	0.08%	30	0.0024	0.08%	73.59	0.0085	0.09%	40.75	0.0102	0.31%	0.56%	10,031,802	181,134,118	181,134,000	
47	HANUA	171,102,316	400	0.0034	0.08%	2	0.0002	0.01%	59.90	0.0069	0.07%	37.15	0.0093	0.28%	0.44%	7,926,590	179,028,906	179,029,000	
48	RAMANG	171,102,316	538	0.0046	0.11%	5	0.0004	0.01%	116.38	0.0135	0.13%	40.67	0.0102	0.31%	0.57%	10,261,270	181,363,586	181,364,000	
49	TAMBAK	171,102,316	313	0.0027	0.07%	13	0.0010	0.04%	11.98	0.0014	0.01%	46.36	0.0116	0.35%	0.46%	8,392,455	179,494,771	179,495,000	
50	PAHAWAN	171,102,316	912	0.0077	0.19%	40	0.0032	0.11%	196.81	0.0228	0.23%	43.41	0.0109	0.33%	0.86%	15,487,990	186,590,306	186,590,000	
51	GOHA	171,102,316	734	0.0062	0.16%	15	0.0012	0.04%	126.65	0.0146	0.15%	37.96	0.0095	0.29%	0.63%	11,356,009	182,458,325	182,458,000	
52	BAWAN	171,102,316	102	0.0009	0.02%	38	0.0030	0.10%	148.89	0.0172	0.17%	39.72	0.0100	0.30%	0.60%	10,788,771	181,891,087	181,891,000	
53	TUMBANG TARUSAN	171,102,316	513	0.0043	0.11%	21	0.0017	0.06%	56.48	0.0065	0.07%	42.87	0.0107	0.32%	0.55%	10,010,679	181,112,995	181,113,000	
54	PANDAWEI	171,102,316	248	0.0021	0.05%	10	0.0008	0.03%	10.27	0.0012	0.01%	53.12	0.0133	0.40%	0.49%	8,876,304	179,978,619	179,979,000	
55	PANGI	171,102,316	667	0.0056	0.14%	30	0.0024	0.08%	42.79	0.0049	0.05%	27.46	0.0069	0.21%	0.48%	8,669,435	179,771,751	179,772,000	
56	TANGKAHEN	171,102,316	1222	0.0104	0.26%	10	0.0008	0.03%	20.54	0.0024	0.02%	34.60	0.0087	0.26%	0.57%	10,300,636	181,402,951	181,403,000	
57	KASALI BARU	171,102,316	150	0.0013	0.03%	12	0.0009	0.03%	15.40	0.0018	0.02%	59.97	0.0150	0.45%	0.53%	9,639,478	180,741,794	180,742,000	
58	BUNTOI	171,102,316	2679	0.0227	0.57%	352	0.0278	0.97%	22.47	0.0026	0.03%	27.91	0.0070	0.21%	1.77%	32,048,821	203,151,136	203,151,000	
59	MINTIN	171,102,316	3284	0.0278	0.70%	590	0.0465	1.63%	22.47	0.0026	0.03%	33.18	0.0083	0.25%	2.60%	46,941,595	218,043,911	218,044,000	



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	=(6)+(9)+(12)+	(17)	(18)= (3) + (17)	(19)
60	MENTAREN I	171,102,316	2225	0.0188	0.47%	174	0.0137	0.48%	23.24	0.0027	0.03%	21.63	0.0054	0.16%	1.14%	20,604,621	191,706,937	191,707,000
61	ANJIR PULANG PISAU	171,102,316	4981	0.0422	1.05%	387	0.0305	1.07%	28.50	0.0033	0.03%	28.68	0.0072	0.22%	2.37%	42,827,360	213,929,676	213,930,000
62	GOHONG	171,102,316	1979	0.0168	0.42%	91	0.0072	0.25%	70.17	0.0081	0.08%	35.43	0.0089	0.27%	1.02%	18,381,860	189,484,176	189,484,000
63	MENTAREN II	171,102,316	2493	0.0211	0.53%	325	0.0256	0.90%	15.57	0.0018	0.02%	29.05	0.0073	0.22%	1.66%	30,003,188	201,105,504	201,106,000
64	HANJAK MAJU	171,102,316	1809	0.0153	0.38%	359	0.0283	0.99%	15.54	0.0018	0.02%	46.31	0.0116	0.35%	1.74%	31,426,106	202,528,422	202,528,000
65	TAHAI JAYA	171,102,316	2658	0.0225	0.56%	236	0.0186	0.65%	31.66	0.0037	0.04%	40.82	0.0102	0.31%	1.56%	28,133,256	199,235,572	199,236,000
66	PURWODADI	171,102,316	2289	0.0194	0.48%	219	0.0173	0.60%	38.51	0.0045	0.04%	34.89	0.0087	0.26%	1.40%	25,212,177	196,314,493	196,314,000
67	WONO AGUNG	171,102,316	1912	0.0162	0.40%	114	0.0090	0.31%	24.39	0.0028	0.03%	42.30	0.0106	0.32%	1.07%	19,249,402	190,351,717	190,352,000
68	KANAMIT BARAT	171,102,316	1877	0.0159	0.40%	55	0.0043	0.15%	156.66	0.0181	0.18%	44.42	0.0111	0.33%	1.06%	19,225,345	190,327,661	190,328,000
69	SEI BARU TEWU	171,102,316	515	0.0044	0.11%	45	0.0035	0.12%	102.69	0.0119	0.12%	40.15	0.0101	0.30%	0.65%	11,810,451	182,912,766	182,913,000
70	KANAMIT	171,102,316	1897	0.0161	0.40%	219	0.0173	0.60%	24.47	0.0028	0.03%	37.67	0.0094	0.28%	1.32%	23,797,688	194,900,003	194,900,000
71	GARANTUNG	171,102,316	3039	0.0257	0.64%	260	0.0205	0.72%	30.53	0.0035	0.04%	39.23	0.0098	0.30%	1.69%	30,546,626	201,648,941	201,649,000
72	GANDANG	171,102,316	2745	0.0232	0.58%	212	0.0167	0.59%	30.81	0.0036	0.04%	42.25	0.0106	0.32%	1.52%	27,446,417	198,548,733	198,549,000
73	BADIRIH	171,102,316	676	0.0057	0.14%	105	0.0083	0.29%	82.15	0.0095	0.09%	52.41	0.0131	0.39%	0.92%	16,653,090	187,755,406	187,755,000
74	TAHAI BARU	171,102,316	1976	0.0167	0.42%	182	0.0143	0.50%	30.99	0.0036	0.04%	39.07	0.0098	0.29%	1.25%	22,582,616	193,684,932	193,685,000
75	MALIKU BARU	171,102,316	3265	0.0277	0.69%	184	0.0145	0.51%	13.10	0.0015	0.02%	37.08	0.0093	0.28%	1.49%	26,966,846	198,069,161	198,069,000
76	SIDODADI	171,102,316	1171	0.0099	0.25%	82	0.0065	0.23%	62.04	0.0072	0.07%	47.39	0.0119	0.36%	0.90%	16,297,439	187,399,755	187,400,000
77	KANAMIT JAYA	171,102,316	902	0.0076	0.19%	90	0.0071	0.25%	13.64	0.0016	0.02%	39.78	0.0100	0.30%	0.75%	13,623,427	184,725,743	184,726,000
78	GANDANG BARAT	171,102,316	938	0.0079	0.20%	49	0.0039	0.14%	106.96	0.0124	0.12%	43.96	0.0110	0.33%	0.79%	14,234,296	185,336,612	185,337,000
79	MALIKU MULYA	171,102,316	449	0.0038	0.10%	46	0.0036	0.13%	9.36	0.0011	0.01%	46.44	0.0116	0.35%	0.58%	10,512,956	181,615,271	181,615,000
80	GARUNG	171,102,316	1113	0.0094	0.24%	104	0.0082	0.29%	119.80	0.0139	0.14%	32.36	0.0081	0.24%	0.90%	16,337,341	187,439,657	187,440,000
81	HENDA	171,102,316	628	0.0053	0.13%	90	0.0071	0.25%	85.57	0.0099	0.10%	42.05	0.0105	0.32%	0.80%	14,386,174	185,488,490	185,488,000
82	SIMPUR	171,102,316	480	0.0041	0.10%	112	0.0088	0.31%	68.46	0.0079	0.08%	54.38	0.0136	0.41%	0.90%	16,233,983	187,336,299	187,336,000
83	SAKAKAJANG	171,102,316	862	0.0073	0.18%	71	0.0056	0.20%	102.69	0.0119	0.12%	31.63	0.0079	0.24%	0.74%	13,276,001	184,378,316	184,378,000
84	JABIREN	171,102,316	2735	0.0232	0.58%	284	0.0224	0.78%	41.76	0.0048	0.05%	26.59	0.0067	0.20%	1.61%	29,097,568	200,199,884	200,200,000
85	PILANG	171,102,316	1370	0.0116	0.29%	184	0.0145	0.51%	308.06	0.0356	0.36%	32.34	0.0081	0.24%	1.40%	25,235,620	196,337,936	196,338,000
86	TUMBANG NUSA	171,102,316	1028	0.0087	0.22%	71	0.0056	0.20%	34.39	0.0040	0.04%	28.02	0.0070	0.21%	0.66%	11,993,931	183,096,247	183,096,000
87	TANJUNG TARUNA	171,102,316	598	0.0051	0.13%	87	0.0069	0.24%	169.43	0.0196	0.20%	31.58	0.0079	0.24%	0.80%	14,451,548	185,553,863	185,554,000
88	PADURAN SEBANGAU	171,102,316	977	0.0083	0.21%	107	0.0084	0.30%	1,476.96	0.1708	1.71%	51.45	0.0129	0.39%	2.60%	46,901,559	218,003,875	218,004,000
89	PADURAN MULYA	171,102,316	538	0.0046	0.11%	57	0.0045	0.16%	66.32	0.0077	0.08%	51.20	0.0128	0.39%	0.73%	13,238,044	184,340,360	184,340,000
90	SEBANGAU MULYA	171,102,316	851	0.0072	0.18%	180	0.0142	0.50%	18.27	0.0021	0.02%	45.89	0.0115	0.35%	1.04%	18,840,618	189,942,934	189,943,000
91	SEBANGAU PERMAI	171,102,316	1340	0.0113	0.28%	205	0.0162	0.57%	69.62	0.0081	0.08%	41.43	0.0104	0.31%	1.24%	22,422,817	193,525,132	193,525,000
92	MEKAR JAYA	171,102,316	981	0.0083	0.21%	125	0.0099	0.34%	8.28	0.0010	0.01%	43.11	0.0108	0.32%	0.89%	16,010,871	187,113,186	187,113,000



No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	Pembulatan Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot			Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	= (6)+(9)+(12)+	(17)	(18)= (3) + (17)	(19)
93	SEBANGAU JAYA	171,102,316	350	0.0030	0.07%	92	0.0073	0.25%	67.94	0.0079	0.08%	46.79	0.0117	0.35%	0.76%	13,697,834	184,800,150	184,800,000
94	SEI HAMBAWANG	171,102,316	725	0.0061	0.15%	179	0.0141	0.49%	102.69	0.0119	0.12%	57.69	0.0145	0.43%	1.20%	21,674,311	192,776,627	192,777,000
95	SEI BAKAU	171,102,316	836	0.0071	0.18%	177	0.0140	0.49%	41.07	0.0047	0.05%	52.66	0.0132	0.40%	1.11%	20,029,423	191,131,739	191,132,000
																	-	
Total		16,254,720,000	118,067	1	25.00%	12,683	1	35.00%	8,648.40	1	10.00%	3,988.84	1	30.00%	100.00%	1,806,080,000	18,060,800,000	18,060,800,000

Kontrol Penghitungan	
Pagu ADD Kab. Pulang Pisau	18,060,800,000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	16,254,720,000 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	1,806,080,000 (e)
Jumlah Desa	95

Bobot	
JP	25% (f)
AK	35% (g)
LW	10% (h)
IKG	30% (i)

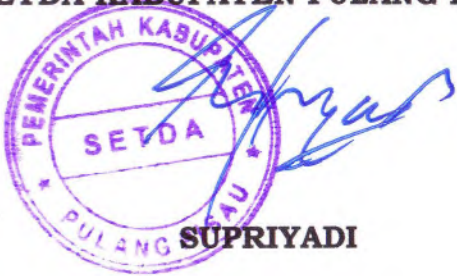
Nilai Tertinggi	226,850,000	PAPUYU I SEI. PASANAN
Nilai Terendah	179,017,000	BAHU PALAWA

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PULANG PISAU,



SUPRIYADI



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU  
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF (Rp)	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN (Rp)	TOTAL ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)={(3)+(4)}
<b>KECAMATAN PANDIH BATU</b>				
1	DANDANG	391,200,000	204,001,000	595,201,000
2	TALIO	343,200,000	190,271,000	533,471,000
3	PANGKOH HILIR	361,200,000	183,123,000	544,323,000
4	PANGKOH HULU	391,200,000	184,977,000	576,177,000
5	KANTAN MUARA	439,200,000	191,125,000	630,325,000
6	TALIO MUARA	654,000,000	194,367,000	848,367,000
7	TALIO HULU	543,600,000	190,101,000	733,701,000
8	PANGKOH SARI	421,200,000	185,897,000	607,097,000
9	SANGGANG	387,000,000	186,203,000	573,203,000
10	PANTIK	369,000,000	183,373,000	552,373,000
11	BELANTIK SIAM	527,400,000	190,976,000	718,376,000
12	GADABUNG	399,000,000	187,342,000	586,342,000
13	MULYA SARI	445,200,000	191,547,000	636,747,000
14	KANTAN DALAM	445,200,000	192,966,000	638,166,000
15	KANTAN ATAS	415,800,000	188,025,000	603,825,000
16	KARYA BERSAMA	385,200,000	191,839,000	577,039,000
<b>KECAMATAN KAHAYAN KUALA</b>				
17	CEMANTAN	367,200,000	206,336,000	573,536,000
18	SEI BARUNAI	361,200,000	186,376,000	547,576,000
19	KIAPAK	339,000,000	189,152,000	528,152,000
20	SEI PASANAN	397,200,000	226,850,000	624,050,000
21	SUNGAI RUNGUN	294,600,000	188,995,000	483,595,000
22	BAHAUR HILIR	435,600,000	192,953,000	628,553,000
23	BAHAUR TENGAH	494,400,000	216,671,000	711,071,000
24	BAHAUR HULU	355,200,000	196,199,000	551,399,000
25	SEI PUDAK	385,200,000	211,933,000	597,133,000
26	TANJUNG PERAWAN	382,000,000	185,988,000	567,988,000
27	BAHAUR HULU PERMAI	379,600,000	208,847,000	588,447,000
28	BAHAUR BATU RAYA	311,200,000	190,856,000	502,056,000
<b>KECAMATAN KAHAYAN TENGAH</b>				
29	TANJUNG SANGALANG	310,800,000	179,790,000	490,590,000
30	PENDA BARANIA	298,800,000	184,114,000	482,914,000
31	BUKIT RAWI	321,000,000	179,330,000	500,330,000
32	TUWUNG	270,600,000	179,644,000	450,244,000
33	SIGI	315,000,000	182,795,000	497,795,000
34	PETUK LITI	349,200,000	182,486,000	531,686,000
35	BUKIT LITI	343,200,000	185,764,000	528,964,000
36	BAHU PALAWA	343,200,000	179,017,000	522,217,000
37	PAMARUNAN	321,000,000	182,991,000	503,991,000
38	BALUKON	270,600,000	183,952,000	454,552,000
39	BUKIT BAMBA	343,200,000	179,746,000	522,946,000
40	TAHAWA	343,200,000	187,231,000	530,431,000
41	PARAHANGAN	276,600,000	189,988,000	466,588,000
42	BERENG RAMBANG	276,600,000	182,784,000	459,384,000



NOMOR	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF (Rp)	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN (Rp)	TOTAL ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)={ (3)+(4) }
<b>KECAMATAN BANAMA TINGANG</b>				
43	MANEN PADURAN	343,200,000	181,253,000	524,453,000
44	MANEN KALEKA	343,200,000	180,714,000	523,914,000
45	LAWANG URU	355,200,000	182,700,000	537,900,000
46	HURUNG	310,800,000	181,134,000	491,934,000
47	HANUA	316,800,000	179,029,000	495,829,000
48	RAMANG	315,000,000	181,364,000	496,364,000
49	TAMBAK	304,800,000	179,495,000	484,295,000
50	PAHAWAN	367,200,000	186,590,000	553,790,000
51	GOHA	373,200,000	182,458,000	555,658,000
52	BAWAN	322,800,000	181,891,000	504,691,000
53	TUMBANG TARUSAN	304,800,000	181,113,000	485,913,000
54	PANDAWEI	304,800,000	179,979,000	484,779,000
55	PANGI	310,800,000	179,772,000	490,572,000
56	TANGKAHEN	373,200,000	181,403,000	554,603,000
57	KASALI BARU	337,200,000	180,742,000	517,942,000
<b>KECAMATAN KAHAYAN HILIR</b>				
58	BUNTOI	441,600,000	203,151,000	644,751,000
59	MINTIN	466,200,000	218,044,000	684,244,000
60	MANTAREN I	369,200,000	191,707,000	560,907,000
61	ANJIR PULANG PISAU	469,800,000	213,930,000	683,730,000
62	GOHONG	373,200,000	189,484,000	562,684,000
63	MANTAREN II	411,600,000	201,106,000	612,706,000
64	HANJAK MAJU	447,600,000	202,528,000	650,128,000
<b>KECAMATAN MALIKU</b>				
65	TAHAI JAYA	654,000,000	199,236,000	853,236,000
66	PURWODADI	549,600,000	196,314,000	745,914,000
67	WONO AGUNG	471,600,000	190,352,000	661,952,000
68	KANAMIT BARAT	469,200,000	190,328,000	659,528,000
69	SEI BARU TEWU	337,800,000	182,913,000	520,713,000
70	KANAMIT	483,600,000	194,900,000	678,500,000
71	GARANTUNG	650,400,000	201,649,000	852,049,000
72	GANDANG	557,400,000	198,549,000	755,949,000
73	BADIRIH	367,200,000	187,755,000	554,955,000
74	TAHAI BARU	535,200,000	193,685,000	728,885,000
75	MALIKU BARU	474,000,000	198,069,000	672,069,000
76	SIDODADI	475,200,000	187,400,000	662,600,000
77	KANAMIT JAYA	391,200,000	184,726,000	575,926,000
78	GANDANG BARAT	421,200,000	185,337,000	606,537,000
79	MALIKU MULYA	339,000,000	181,615,000	520,615,000
<b>KECAMATAN JABIREN RAYA</b>				
80	GARUNG	298,400,000	187,440,000	485,840,000
81	HENDA	310,800,000	185,488,000	496,288,000
82	SIMPUR	337,200,000	187,336,000	524,536,000
83	SAKA KAJANG	286,400,000	184,378,000	470,778,000
84	JABIREN	443,600,000	200,200,000	643,800,000
85	PILANG	316,800,000	196,338,000	513,138,000
86	TUMBANG NUSA	322,800,000	183,096,000	505,896,000
87	TANJUNG TARUNA	355,200,000	185,554,000	540,754,000



NOMOR	NAMA DESA	ALOKASI SILTAP, TUNJANGAN DAN INSENTIF (Rp)	ALOKASI ANGGARAN BIDANG KEGIATAN (Rp)	TOTAL ALOKASI DANA DESA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)={ (3)+(4) }
<b>KECAMATAN SEBANGAU KUALA</b>				
88	PADURAN SEBANGAU	333,000,000	218,004,000	551,004,000
89	PADURAN MULYA	403,200,000	184,340,000	587,540,000
90	SEBANGAU MULYA	469,200,000	189,943,000	659,143,000
91	SEBANGAU PERMAI	481,200,000	193,525,000	674,725,000
92	MEKAR JAYA	481,200,000	187,113,000	668,313,000
93	SEBANGAU JAYA	385,200,000	184,800,000	570,000,000
94	SEI HAMBAWANG	397,200,000	192,777,000	589,977,000
95	SEI BAKAU	375,000,000	191,132,000	566,132,000
<b>Total</b>		<b>36,939,200,000</b>	<b>18,060,800,000</b>	<b>55,000,000,000</b>

**BUPATI PULANG PISAU**

ttd

**EDY PRATOWO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PULANG PISAU,**



**SUPRIYADI**



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) PADA SETIAP DESA  
DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP I (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP II (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP III (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP IV (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=[(3)x20%]	(5)=[(3)x20%]	(6)=[(3)x30%]	(7)=[(3)x30%]
KECAMATAN PANDIH BATU						
1	DANDANG	595,201,000	119,040,200	119,040,200	178,560,300	178,560,300
2	TALIO	533,471,000	106,694,200	106,694,200	160,041,300	160,041,300
3	PANGKOH HILIR	544,323,000	108,864,600	108,864,600	163,296,900	163,296,900
4	PANGKOH HULU	576,177,000	115,235,400	115,235,400	172,853,100	172,853,100
5	KANTAN MUARA	630,325,000	126,065,000	126,065,000	189,097,500	189,097,500
6	TALIO MUARA	848,367,000	169,673,400	169,673,400	254,510,100	254,510,100
7	TALIO HULU	733,701,000	146,740,200	146,740,200	220,110,300	220,110,300
8	PANGKOH SARI	607,097,000	121,419,400	121,419,400	182,129,100	182,129,100
9	SANGGANG	573,203,000	114,640,600	114,640,600	171,960,900	171,960,900
10	PANTIK	552,373,000	110,474,600	110,474,600	165,711,900	165,711,900
11	BELANTIK SIAM	718,376,000	143,675,200	143,675,200	215,512,800	215,512,800
12	GADABUNG	586,342,000	117,268,400	117,268,400	175,902,600	175,902,600
13	MULYA SARI	636,747,000	127,349,400	127,349,400	191,024,100	191,024,100
14	KANTAN DALAM	638,166,000	127,633,200	127,633,200	191,449,800	191,449,800
15	KANTAN ATAS	603,825,000	120,765,000	120,765,000	181,147,500	181,147,500
16	KARYA BERSAMA	577,039,000	115,407,800	115,407,800	173,111,700	173,111,700
KECAMATAN KAHAYAN KUALA						
17	CEMANTAN	573,536,000	114,707,200	114,707,200	172,060,800	172,060,800
18	SEI BARUNAI	547,576,000	109,515,200	109,515,200	164,272,800	164,272,800
19	KIAPAK	528,152,000	105,630,400	105,630,400	158,445,600	158,445,600
20	SEI PASANAN	624,050,000	124,810,000	124,810,000	187,215,000	187,215,000
21	SUNGAI RUNGUN	483,595,000	96,719,000	96,719,000	145,078,500	145,078,500
22	BAHAUR HILIR	628,553,000	125,710,600	125,710,600	188,565,900	188,565,900
23	BAHAUR TENGAH	711,071,000	142,214,200	142,214,200	213,321,300	213,321,300
24	BAHAUR HULU	551,399,000	110,279,800	110,279,800	165,419,700	165,419,700
25	SEI PUDAK	597,133,000	119,426,600	119,426,600	179,139,900	179,139,900
26	TANJUNG PERAWAN	567,988,000	113,597,600	113,597,600	170,396,400	170,396,400
27	BAHAUR HULU PERMA	588,447,000	117,689,400	117,689,400	176,534,100	176,534,100
28	BAHAUR BATU RAYA	502,056,000	100,411,200	100,411,200	150,616,800	150,616,800
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH						
29	TANJUNG SANGALANG	490,590,000	98,118,000	98,118,000	147,177,000	147,177,000
30	PENDA BARANIA	482,914,000	96,582,800	96,582,800	144,874,200	144,874,200
31	BUKIT RAWI	500,330,000	100,066,000	100,066,000	150,099,000	150,099,000
32	TUWUNG	450,244,000	90,048,800	90,048,800	135,073,200	135,073,200
33	SIGI	497,795,000	99,559,000	99,559,000	149,338,500	149,338,500
34	PETUK LITI	531,686,000	106,337,200	106,337,200	159,505,800	159,505,800
35	BUKIT LITI	528,964,000	105,792,800	105,792,800	158,689,200	158,689,200
36	BAHU PALAWA	522,217,000	104,443,400	104,443,400	156,665,100	156,665,100
37	PAMARUNAN	503,991,000	100,798,200	100,798,200	151,197,300	151,197,300
38	BALUKON	454,552,000	90,910,400	90,910,400	136,365,600	136,365,600
39	BUKIT BAMBA	522,946,000	104,589,200	104,589,200	156,883,800	156,883,800
40	TAHAWA	530,431,000	106,086,200	106,086,200	159,129,300	159,129,300
41	PARAHANGAN	466,588,000	93,317,600	93,317,600	139,976,400	139,976,400
42	BERENG RAMBANG	459,384,000	91,876,800	91,876,800	137,815,200	137,815,200
KECAMATAN BANAMA TINGANG						
43	MANEN PADURAN	524,453,000	104,890,600	104,890,600	157,335,900	157,335,900
44	MANEN KALEKA	523,914,000	104,782,800	104,782,800	157,174,200	157,174,200
45	LAWANG URU	537,900,000	107,580,000	107,580,000	161,370,000	161,370,000
46	HURUNG	491,934,000	98,386,800	98,386,800	147,580,200	147,580,200
47	HANUA	495,829,000	99,165,800	99,165,800	148,748,700	148,748,700
48	RAMANG	496,364,000	99,272,800	99,272,800	148,909,200	148,909,200
49	TAMBAK	484,295,000	96,859,000	96,859,000	145,288,500	145,288,500
50	PAHAWAN	553,790,000	110,758,000	110,758,000	166,137,000	166,137,000
51	GOHA	555,658,000	111,131,600	111,131,600	166,697,400	166,697,400
52	BAWAN	504,691,000	100,938,200	100,938,200	151,407,300	151,407,300
53	TUMBANG TARUSAN	485,913,000	97,182,600	97,182,600	145,773,900	145,773,900
54	PANDAWEI	484,779,000	96,955,800	96,955,800	145,433,700	145,433,700
55	PANGI	490,572,000	98,114,400	98,114,400	147,171,600	147,171,600
56	TANGKAHEN	554,603,000	110,920,600	110,920,600	166,380,900	166,380,900
57	KASALI BARU	517,942,000	103,588,400	103,588,400	155,382,600	155,382,600



No.	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP I (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP II (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP III (Rp)	PENYALURAN ADD TAHAP IV (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)=((3)x20%)	(5)=((3)x20%)	(6)=((3)x30%)	(7)=((3)x30%)
KECAMATAN KAHAYAN HILIR						
58	BUNTOI	644,751,000	128,950,200	128,950,200	193,425,300	193,425,300
59	MINTIN	684,244,000	136,848,800	136,848,800	205,273,200	205,273,200
60	MANTAREN I	560,907,000	112,181,400	112,181,400	168,272,100	168,272,100
61	ANJIR PULANG PISAU	683,730,000	136,746,000	136,746,000	205,119,000	205,119,000
62	GOHONG	562,684,000	112,536,800	112,536,800	168,805,200	168,805,200
63	MANTAREN II	612,706,000	122,541,200	122,541,200	183,811,800	183,811,800
64	HANJAK MAJU	650,128,000	130,025,600	130,025,600	195,038,400	195,038,400
KECAMATAN MALIKU						
65	TAHAI JAYA	853,236,000	170,647,200	170,647,200	255,970,800	255,970,800
66	PURWODADI	745,914,000	149,182,800	149,182,800	223,774,200	223,774,200
67	WONO AGUNG	661,952,000	132,390,400	132,390,400	198,585,600	198,585,600
68	KANAMIT BARAT	659,528,000	131,905,600	131,905,600	197,858,400	197,858,400
69	SEI BARU TEWU	520,713,000	104,142,600	104,142,600	156,213,900	156,213,900
70	KANAMIT	678,500,000	135,700,000	135,700,000	203,550,000	203,550,000
71	GARANTUNG	852,049,000	170,409,800	170,409,800	255,614,700	255,614,700
72	GANDANG	755,949,000	151,189,800	151,189,800	226,784,700	226,784,700
73	BADIRIH	554,955,000	110,991,000	110,991,000	166,486,500	166,486,500
74	TAHAI BARU	728,885,000	145,777,000	145,777,000	218,665,500	218,665,500
75	MALIKU BARU	672,069,000	134,413,800	134,413,800	201,620,700	201,620,700
76	SIDODADI	662,600,000	132,520,000	132,520,000	198,780,000	198,780,000
77	KANAMIT JAYA	575,926,000	115,185,200	115,185,200	172,777,800	172,777,800
78	GANDANG BARAT	606,537,000	121,307,400	121,307,400	181,961,100	181,961,100
79	MALIKU MULYA	520,615,000	104,123,000	104,123,000	156,184,500	156,184,500
KECAMATAN JABIREN RAYA						
80	GARUNG	485,840,000	97,168,000	97,168,000	145,752,000	145,752,000
81	HENDA	496,288,000	99,257,600	99,257,600	148,886,400	148,886,400
82	SIMPUR	524,536,000	104,907,200	104,907,200	157,360,800	157,360,800
83	SAKA KAJANG	470,778,000	94,155,600	94,155,600	141,233,400	141,233,400
84	JABIREN	643,800,000	128,760,000	128,760,000	193,140,000	193,140,000
85	PILANG	513,138,000	102,627,600	102,627,600	153,941,400	153,941,400
86	TUMBANG NUSA	505,896,000	101,179,200	101,179,200	151,768,800	151,768,800
87	TANJUNG TARUNA	540,754,000	108,150,800	108,150,800	162,226,200	162,226,200
KECAMATAN SEBANGAU KUALA						
88	PADURAN SABANGAU	551,004,000	110,200,800	110,200,800	165,301,200	165,301,200
89	PADURAN MULYA	587,540,000	117,508,000	117,508,000	176,262,000	176,262,000
90	SEBANGAU MULYA	659,143,000	131,828,600	131,828,600	197,742,900	197,742,900
91	SEBANGAU PERMAI	674,725,000	134,945,000	134,945,000	202,417,500	202,417,500
92	MEKAR JAYA	668,313,000	133,662,600	133,662,600	200,493,900	200,493,900
93	SEBANGAU JAYA	570,000,000	114,000,000	114,000,000	171,000,000	171,000,000
94	SEI HAMBAWANG	589,977,000	117,995,400	117,995,400	176,993,100	176,993,100
95	SEI BAKAU	566,132,000	113,226,400	113,226,400	169,839,600	169,839,600
Total		55,000,000,000	11,000,000,000	11,000,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000

**BUPATI PULANG PISAU**

ttd

**EDY PRATOWO**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PULANG PISAU,**





LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU  
NOMOR 2 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN,  
DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2019



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

....., ..... 2019

Nomor : ..... / .../.../2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penyaluran Alokasi  
Dana Desa (ADD) Tahap...(..%)  
Tahun Anggaran 2019

Kepada :  
Yth. Bupati Pulang Pisau  
Up. Kepala DPMD Kab. Pulang Pisau

di-  
Pulang Pisau

Sehubungan dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa (ADD) Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019, berdasarkan  
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengalokasian,  
Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, maka  
bersama ini kami mohon agar dapat dilakukan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)  
Tahap ..... sehingga kegiatan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa (APBDes) ..... dapat terlaksana.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, disampaikan dokumen-dokumen terlampir  
sebagai berikut :

1. Surat Rekomendasi Camat;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan ADD Tahap...(..%) (*tahap sebelumnya*);
3. Laporan Realisasi Penyerapan ADD Tahap ... (..) (*tahap sebelumnya*);
4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2019;
5. Surat Keputusan Kepala Desa ..... tentang Pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak Bupati Pulang Pisau  
kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DESA .....,

.....  
NIAP.161 001 107 ....









PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
KECAMATAN .....  
**DESA . . . . .**

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

LAPORAN PENDAHULUAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA  
TAHAP..... (.....) TAHUN 2019  
DESA . . . . .

Pagu Alokasi Dana Desa Rp. ....  
Pagu Tahap ... (.....%) Rp. ....

KODE REKENING				URAIAN	VOLUME	SATUAN	PAGU ANGGARAN (Rupiah)
1				2	3	4	5
2				<b>BELANJA</b>			
2	1			<b>Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>			
2	1	1		Kegiatan			
2	1	2		Kegiatan dst.....			
2	2			<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
2	2	1		Kegiatan			
2	2	2		Kegiatan dst.....			
2	3			<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
2	3	1		Kegiatan			
2	3	2		Kegiatan dst.....			
2	4			<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>			
2	4	1		Kegiatan			
2	4	2		Kegiatan dst.....			
<b>JUMLAH BELANJA</b>							
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>							
3				<b>PEMBIAYAAN</b>			
3	1			<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
3	1	1		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
3	2			<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3	2	1		Penyertaan Modal Desa			
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>							

.....2019

Di Setujui oleh  
KEPALA DESA .....

PPKD

(.....)  
NIAP. 161 001 107 ...

(.....)





**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU**

**KECAMATAN .....**

**DESA .....**

Alamat : ..... Kode Pos 73 .....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Nomor :.../.../Ds-.../.../2019

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pulang Pisau, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan dan kebenaran laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap ... (....%) Desa .....

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya dalam laporan tersebut kami simpan aslinya dan kami sampaikan copynya sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Desa .....  
pada tanggal, .....2019

KEPALA DESA .....

Meterai 6000

(.....)  
NIAP.161 001 107 .....

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**EDY PRATOWO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PULANG PISAU,**



**SUPRIYADI**